

Illegal Cigarette Profits and Informal Accounting Practices: A Political Economy of Accounting Perspective

Assri Nur Tri Oktafiyanti^{1*}, Bambang Haryadi², Robiatul Auliyah³

Master of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Trunojoyo Madura

assrinuur0510@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 8 September 2025

Disetujui : 8 Oktober 2025

Dipublikasi : 15 Oktober 2025

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of illegal profits from the sale of cigarettes without excise stamps in GBG-SLM Regency using the Political Economy of Accounting (PEA) approach. The main objective is to analyze the practice of illegal cigarette profits from a PEA perspective and highlight its implications for the economic system and fiscal regulation at the local level. The research employed a qualitative method with a critical paradigm, where data were collected through field observations, in-depth interviews with business actors, and documentation analysis related to production and distribution activities. The findings reveal that the illegal cigarette industry is dominated by small and medium-sized kinship-based enterprises. The profits generated are relatively high but remain unrecorded in the formal financial system, creating gaps in state revenue. Accounting practices used by the actors serve merely as a formality to evade fiscal obligations, rather than as tools for transparency or accountability. This condition reflects the interplay of power relations, local culture, and economic interests in sustaining the practice of illegal cigarette trade. The novelty of this research lies in its PEA-based analysis that integrates political economy perspectives with local values and culture, thereby contributing to the formulation of more contextual fiscal policies. Thus, this study emphasizes that accounting is not solely a technical instrument but also a social, political, and cultural practice that shapes the sustainability of public policy.

Keywords: *illegal profits, illegal cigarettes, Political Economy of Accounting*

PENDAHULUAN

Industri rokok merupakan sektor strategis yang menyumbang penerimaan besar bagi negara melalui cukai. Namun, peningkatan produksi dan distribusi rokok ilegal dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan masalah serius, terutama di Kabupaten GBG-SLM, Madura. Aktivitas ini mengurangi penerimaan fiskal, menciptakan distorsi pasar, dan memperburuk ketimpangan sosial. Rokok ilegal dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk legal karena tidak membayar cukai, sehingga memicu persaingan tidak sehat (Pratiwi et al., 2022). Fenomena ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi bayangan (shadow economy) Indonesia yang mencapai 18,7% dari PDB pada 2023, menunjukkan besarnya porsi aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar sistem formal (IMF, 2024).

Harga murah menjadi keunggulan utama rokok ilegal karena tidak dibebani biaya kepatuhan dan perizinan. Produsen legal justru menghadapi beban regulasi yang tinggi, menyebabkan pergeseran permintaan ke produk ilegal dan menurunkan daya saing industri sah (Tanara, 2023). Dampak fiskalnya signifikan: potensi kerugian negara akibat rokok ilegal mencapai Rp97,81 triliun pada 2024 (Indodata Research Center, 2024). Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan lebih dari 13 ribu penindakan kasus rokok ilegal sepanjang 2024–2025, menggambarkan maraknya

praktik penghindaran cukai yang melemahkan pendapatan daerah dan nasional (DJBC, 2025).

Perkembangan produksi rokok ilegal juga berkaitan dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil tak berizin. Hingga awal 2025 tercatat 202 pabrik rokok legal di wilayah KPPBC Kudus, tetapi diperkirakan terdapat ratusan unit usaha kecil ilegal yang beroperasi di daerah pedesaan. Kegiatan ini menumbuhkan ekonomi lokal informal sekaligus menanamkan budaya ketidakpatuhan fiskal. Situasi ini memperjelas kesenjangan antara sistem fiskal formal dan realitas ekonomi berbasis komunitas, di mana pelaku informal sering mengandalkan jaringan sosial dan norma lokal alih-alih akuntabilitas institusional. However, most existing studies examine illegal cigarettes from economic or legal aspects, while the role of informal accounting and local power relations remains underexplored.

Dari perspektif Political Economy of Accounting (PEA), fenomena rokok ilegal tidak sekadar pelanggaran administratif, tetapi refleksi dari relasi kekuasaan dan ketimpangan struktural yang mengakar (Cooper & Sherer, 1984; Ahsan et al., 2024). PEA menyoroti bahwa praktik akuntansi dan pelaporan keuangan tidak pernah netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks budaya lokal seperti Madura, sistem kepercayaan komunitas, patronase ekonomi, dan relasi sosial antaraktor lokal sering menggantikan mekanisme akuntansi formal dalam menjaga legitimasi usaha. Pendekatan ini menjadi novelty penelitian, karena memadukan analisis ekonomi-politik dengan dimensi budaya lokal untuk menjelaskan bagaimana praktik akuntansi informal berkontribusi pada keberlanjutan industri rokok ilegal di tingkat daerah.

STUDI LITERATUR

Tata Kelola (Governance)

Tata kelola (governance) merupakan seperangkat prinsip dan mekanisme yang mengarahkan serta mengawasi proses pengambilan keputusan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Menurut OECD (2021) dan World Bank (2020), tata kelola mencakup cara kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial demi kepentingan publik. Dalam konteks industri tembakau, tata kelola berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi cukai dan pelaporan keuangan yang jujur. Kelemahan tata kelola dapat membuka ruang bagi praktik ekonomi informal seperti produksi rokok ilegal yang merugikan negara secara fiskal dan menghambat sistem ekonomi yang berkelanjutan. Studi Rahman dan Chaudhuri (2022) di Asia Selatan menegaskan bahwa lemahnya governance menciptakan “institutional voids” yang dimanfaatkan oleh pelaku industri bayangan untuk menghindari regulasi formal.

Political Economy of Accounting (PEA)

Political Economy of Accounting (PEA) merupakan pendekatan kritis yang menempatkan praktik akuntansi dalam kerangka relasi kekuasaan serta struktur politik-ekonomi (Cooper & Sherer, 1984; Ahsan et al., 2024). PEA memandang laporan keuangan bukan sekadar representasi netral, tetapi refleksi dari kepentingan sosial dan politik yang dominan. Dalam konteks industri rokok ilegal, pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana praktik akuntansi digunakan untuk menghindari kewajiban fiskal serta menutupi keuntungan ilegal. Penelitian oleh Wickramasinghe dan Hopper (2023) menunjukkan bahwa dalam ekonomi berkembang di Asia, akuntansi sering digunakan sebagai alat hegemoni oleh kelompok elite ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, PEA relevan untuk menjelaskan keterkaitan antara praktik manipulasi akuntansi, struktur kekuasaan lokal, dan legitimasi sosial dalam sektor informal.

Industri Rokok Ilegal dan Dampak Fiskal

Industri rokok ilegal didefinisikan sebagai produksi dan distribusi rokok tanpa izin resmi atau tanpa pita cukai sebagaimana diwajibkan oleh hukum (Pratiwi et al., 2022; Wahyuni & Asri, 2022). Fenomena ini berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai dan pajak, serta meningkatnya biaya penegakan hukum (Tanara, 2023). Secara global, perdagangan tembakau ilegal menyebabkan kerugian fiskal lebih dari USD 40 miliar setiap tahun (World Health Organization, 2022). Penelitian oleh Vincent (2021) di Sub-Saharan Africa menunjukkan bahwa perdagangan ilegal di sektor tembakau menjadi sumber utama pembiayaan ekonomi informal dan memperkuat jaringan ekonomi bayangan lintas wilayah. Dalam konteks Indonesia, permasalahan

ini semakin kompleks karena keterlibatan jaringan sosial berbasis komunitas yang sulit dijangkau oleh otoritas formal (Aziz & Cahyani, 2023).

Ekonomi Informal dan Relasi Sosial

Aktivitas industri rokok ilegal di Kabupaten GBG-SLM tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi informal yang beroperasi di luar mekanisme perpajakan dan pengawasan negara. Menurut Pratiwi et al. (2022), permodalan usaha dan distribusi rokok ilegal di wilayah ini sangat bergantung pada jaringan kekerabatan dan kepercayaan timbal balik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Godfrey (2023) di Afrika Timur yang menunjukkan bahwa ekonomi informal bergantung pada norma sosial dan solidaritas komunitas, bukan pada aturan formal. Studi Chen et al. (2021) tentang shadow accounting di China juga menegaskan bahwa dalam konteks budaya kolektif, akuntansi informal muncul sebagai strategi adaptif terhadap tekanan ekonomi dan regulasi yang tidak fleksibel. Dengan demikian, praktik ekonomi informal di GBG-SLM dapat dipahami sebagai bentuk resistensi lokal terhadap tata kelola fiskal yang dianggap tidak inklusif.

Praktik Keuntungan Ilegal dan Manipulasi Akuntansi

Keuntungan ilegal dalam industri rokok diperoleh melalui praktik seperti pembukuan ganda, penghindaran pajak, dan manipulasi laporan keuangan (Saukhan Aulana et al., 2025). PEA menafsirkan praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ekspresi dari relasi kekuasaan di mana aktor ekonomi memanfaatkan celah kelembagaan untuk mempertahankan posisi dominan (Ahsan et al., 2024). Studi Gallhofer dan Haslam (2022) menggarisbawahi bahwa praktik “shadow accounting” sering muncul dalam konteks di mana regulasi formal tidak dipercaya dan norma sosial lebih berpengaruh. Dengan demikian, fenomena keuntungan ilegal di sektor rokok merupakan bagian dari ekonomi politik lokal yang memperlihatkan pergeseran nilai akuntabilitas dari negara ke komunitas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Pratiwi et al. (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar produsen rokok ilegal di GBG-SLM beroperasi dalam skala mikro yang tidak terdaftar. Wahyuni & Asri (2022) menemukan manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pembayaran cukai. Ahsan et al. (2024) menegaskan relevansi PEA dalam menganalisis struktur kekuasaan dan praktik akuntansi informal di industri lokal. Di sisi lain, studi internasional seperti Vincent (2021), Wickramasinghe & Hopper (2023), dan Chen et al. (2021) memperkuat bahwa fenomena serupa juga terjadi di negara berkembang lain, menandakan pentingnya perspektif lintas-budaya dalam memahami praktik shadow accounting dan ekonomi informal.

Research Gap

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekonomi makro atau regulasi hukum dari industri rokok ilegal, tanpa menyoroti bagaimana praktik akuntansi informal terbentuk dan dilegitimasi oleh struktur sosial lokal. Penelitian internasional seperti Vincent (2021) dan Godfrey (2023) membahas perdagangan ilegal dan ekonomi informal, namun belum mengintegrasikan analisis PEA dalam konteks budaya Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty dengan mengkaji praktik keuntungan ilegal melalui pendekatan Political Economy of Accounting yang memperhatikan dinamika kekuasaan lokal, norma sosial, serta konstruksi akuntabilitas informal di Kabupaten GBG-SLM. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antara tata kelola fiskal, budaya lokal, dan praktik shadow accounting di sektor industri rokok ilegal.

Pertanyaan Penelitian (RQ):

Bagaimana praktik keuntungan ilegal dalam industri rokok ilegal di Kabupaten GBG-SLM dapat dipahami melalui pendekatan *Political Economy of Accounting*, dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan lokal dan nilai-nilai sosial masyarakat?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis dan pendekatan studi kasus, serta menjadikan Political Economy of Accounting (PEA) sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji fenomena keuntungan ilegal dari penjualan rokok tanpa pita cukai di Kabupaten GBG-SLM. Paradigma kritis dipilih karena berorientasi pada upaya mengungkap relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik praktik ekonomi dan akuntansi, sejalan dengan prinsip dasar PEA yang memandang praktik pelaporan keuangan sebagai arena politik dan sosial, bukan sekadar proses teknis (Cooper & Sherer, 1984; Ahsan et al., 2024). Dengan demikian, pendekatan kualitatif-PEA memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana struktur kekuasaan lokal, kepentingan ekonomi, dan nilai sosial membentuk praktik akuntansi informal dalam industri rokok ilegal.

Subjek penelitian meliputi produsen, distributor, pejabat pemerintah daerah, dan petugas Bea Cukai yang memiliki keterlibatan langsung dalam rantai produksi dan distribusi rokok ilegal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria pengalaman, posisi strategis, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi tersebut. Total 12 informan diwawancarai, terdiri atas 5 produsen (P1–P5), 4 distributor (D1–D4), dan 3 pejabat otoritas resmi (O1–O3).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam difokuskan pada eksplorasi praktik pencatatan keuangan, strategi penghindaran cukai, serta persepsi tentang legitimasi ekonomi informal. Observasi dilakukan pada lingkungan produksi dan distribusi, sementara dokumentasi meliputi laporan resmi pemerintah, peraturan cukai, dan hasil penelitian terdahulu. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan daftar periksa dokumen (document checklist).

Seluruh data yang diperoleh dikode secara manual dan dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12, melibatkan tiga tahap analisis yaitu: open coding (mengidentifikasi kategori awal dari transkrip wawancara), axial coding (menghubungkan kategori untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep), dan selective coding (menyusun narasi tematik yang merepresentasikan dinamika kekuasaan, praktik akuntansi informal, dan ekonomi bayangan). Analisis dilakukan secara iteratif, dengan membandingkan temuan lapangan dan teori PEA untuk menghasilkan interpretasi kritis terhadap praktik keuntungan ilegal.

HASIL

Production System

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem produksi rokok ilegal di Kabupaten GBG-SLM didominasi oleh unit usaha berskala kecil hingga menengah. Sebagian besar produsen beroperasi di lingkungan rumah tangga dengan peralatan sederhana, seperti mesin linting manual dan alat pengemasan semi-otomatis. Produksi dilakukan secara tersembunyi, namun tetap stabil dengan kapasitas harian mencapai 5.000–20.000 batang per produsen. Seorang informan mengungkapkan, *“Kami buat di rumah saja, biar tidak banyak orang tahu, tapi produksi tetap jalan tiap hari”* (P2).

Kegiatan produksi umumnya memanfaatkan tenaga kerja lokal, termasuk anggota keluarga. Sistem kerja berbasis kepercayaan dan hubungan kekerabatan menjadikan proses produksi efisien tanpa memerlukan kontrak tertulis. Produsen mengaku memperoleh bahan baku dari pemasok tetap di wilayah sekitar Jawa Timur dengan sistem pembayaran tunai. *“Kalau bahan baku tembakau dan kertas sudah ada langganan, tinggal bayar langsung, tidak pernah lewat rekening”* (P4).

Distribution

Distribusi rokok ilegal dilakukan melalui jaringan informal yang sangat tertutup. Barang dikirim menggunakan kendaraan kecil seperti mobil bak terbuka atau sepeda motor agar tidak menarik perhatian aparat. Jalur distribusi utama menghubungkan produsen di GBG-SLM dengan pasar-pasar tradisional di kabupaten sekitar. *“Biasanya kirim malam hari, ambil langsung dari rumah produksi, nanti dikasih uang cash”* (D1).

Rantai distribusi melibatkan perantara tetap yang berperan sebagai penghubung antara produsen dan pengecer. Sistem pembayaran berlangsung tunai dan tidak tercatat secara resmi. Salah satu distributor menjelaskan, *“Kita tidak pernah pakai transfer, biar aman, cukup catatan kecil saja”*

buat stok" (D3). Barang kemudian disebar ke berbagai wilayah melalui jaringan pengecer lokal yang menjual dalam jumlah kecil.

Produsen → Distributor → Pengecer → Konsumen
Diagram Rantai Distribusi Rokok Ilegal

Informal Accounting

Praktik akuntansi di industri ini bersifat informal dan sederhana. Produsen dan distributor hanya menggunakan buku catatan kecil untuk mencatat bahan baku dan hasil penjualan harian. Tidak ditemukan laporan keuangan formal seperti neraca atau laporan laba rugi. "Kami tidak pernah lapor ke pajak, cuma tulis di buku kecil buat ingat stok dan uang masuk" (P3).

Pencatatan manual ini berfungsi semata untuk kebutuhan internal dan pengendalian kas. Semua transaksi menggunakan uang tunai tanpa bukti transfer atau faktur resmi. Salah satu informan menambahkan, "Kalau pakai rekening bisa dilacak, jadi semua tunai saja" (D2). Kondisi ini menyebabkan aliran dana industri tidak terlacak dalam sistem fiskal nasional dan memperkuat ekonomi informal di wilayah tersebut.

Power Relations

Hubungan kekuasaan dalam industri rokok ilegal menunjukkan struktur hierarkis yang kuat antara produsen, distributor, dan pengecer. Produsen memiliki kendali penuh atas harga, pasokan, dan strategi pemasaran, sedangkan distributor berperan menjaga keamanan distribusi dan loyalitas pengecer. "Kalau distributor tidak jaga rahasia, bisa bahaya buat semua" (P5).

Selain hubungan ekonomi, terdapat pula dimensi sosial dan politik yang memperkuat keberlangsungan industri ini. Beberapa informan mengisyaratkan adanya toleransi dari oknum aparat terhadap aktivitas produksi dan distribusi. "Selama kita jaga batas, tidak ganggu orang, biasanya aman-aman saja" (D4). Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap industri ini juga menciptakan kekuatan sosial yang membuat penegakan hukum sulit dilakukan secara efektif.

PEMBAHASAN

Production System

Penelitian menemukan bahwa sistem produksi rokok ilegal di Kabupaten GBG-SLM didominasi oleh unit rumah tangga berskala kecil hingga menengah. Produsen bekerja secara turun-temurun menggunakan tenaga kerja keluarga dan tetangga terdekat. Aktivitas produksi dilakukan di rumah dengan peralatan sederhana dan tanpa izin resmi, menghasilkan 5.000–20.000 batang per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri rokok ilegal beroperasi dalam ruang ekonomi domestik yang sulit dijangkau pengawasan formal.

Berdasarkan pendekatan *Political Economy of Accounting (PEA)*, pola produksi tersebut mencerminkan bentuk relasi kekuasaan antara pelaku usaha lokal dan negara. Praktik ekonomi yang berbasis keluarga menunjukkan adanya resistensi terhadap tata kelola formal yang dianggap mengancam keberlanjutan ekonomi komunitas. Menurut Ahsan et al. (2024), sistem produksi berbasis sosial seperti ini memperlihatkan bagaimana praktik akuntansi dan ekonomi lokal sering kali terbentuk sebagai respons terhadap tekanan regulatif dan fiskal.

Temuan ini sejalan dengan studi Nguyen (2024) di Vietnam yang menjelaskan bahwa industri rokok ilegal beroperasi melalui pabrik rumah tangga dengan dukungan jaringan komunitas. Fenomena serupa juga terjadi di Afrika Selatan di mana produsen kecil memanfaatkan lemahnya kontrol cukai untuk mempertahankan ekonomi keluarga (Vincent, 2021). Penelitian ini memperluas perspektif PEA dengan menunjukkan bahwa produksi rumah tangga bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum, melainkan strategi sosial-ekonomi yang berakar pada hubungan kekerabatan dan legitimasi komunitas.

Distribution

Distribusi rokok ilegal di GBG-SLM dikelola melalui jaringan sosial tertutup yang terdiri atas distributor, pengecer, dan perantara yang saling percaya. Transaksi dilakukan secara tunai tanpa bukti pembayaran resmi, dan pengiriman barang diatur dalam jumlah kecil untuk menghindari

deteksi aparat. Rantai distribusi ini bersifat lentur karena berbasis kepercayaan dan hubungan personal, sehingga mampu bertahan di tengah tekanan penegakan hukum.

Dalam perspektif PEA, sistem distribusi ini mencerminkan praktik kekuasaan yang tersembunyi di dalam jaringan sosial. Pelaku distribusi tidak hanya berperan sebagai agen ekonomi, tetapi juga sebagai penghubung politik lokal yang menjaga stabilitas perdagangan ilegal. Menurut Cooper dan Sherer (1984), praktik ekonomi tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan yang menopangnya, dan dalam konteks ini, distribusi berfungsi sebagai mekanisme resistensi terhadap sistem fiskal negara. Tata kelola formal yang lemah memberikan ruang bagi terbentuknya sistem logistik alternatif yang lebih responsif terhadap dinamika pasar lokal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Paraje (2022) di Vietnam dan Gallien (2023) di Afrika Timur yang menyatakan bahwa perdagangan rokok ilegal bertahan melalui sistem distribusi berbasis komunitas yang sulit dilacak secara administratif. Studi internasional menunjukkan bahwa hubungan kepercayaan antar pelaku distribusi berperan sebagai pengganti kontrak formal dalam menjaga keberlangsungan bisnis ilegal. Penelitian ini memperluas teori PEA dengan menegaskan bahwa jaringan distribusi informal bukan hanya bentuk efisiensi logistik, tetapi juga instrumen kekuasaan yang mengalihkan kontrol ekonomi dari negara ke tangan komunitas lokal.

Informal Accounting

Praktik akuntansi dalam industri rokok ilegal di GBG-SLM sangat sederhana dan bersifat internal. Produsen serta distributor hanya mencatat jumlah bahan baku dan hasil penjualan dalam buku tulis manual tanpa laporan laba rugi atau pajak. Seorang informan menyatakan, *"We never report to tax officials, only keep notes for ourselves"* (P3). Transaksi sepenuhnya berbasis tunai, sehingga tidak meninggalkan jejak digital atau bukti pembukuan formal yang dapat diaudit oleh otoritas pajak.

Pendekatan PEA memandang fenomena ini sebagai bentuk *shadow accounting*, yaitu praktik akuntansi bayangan yang berkembang di luar sistem formal. Praktik tersebut muncul karena ketimpangan relasi antara pelaku ekonomi lokal dan otoritas fiskal, di mana pelaporan resmi dianggap mengancam kelangsungan usaha. Menurut Chen et al. (2021), *shadow accounting* sering muncul sebagai mekanisme perlindungan sosial terhadap tekanan birokrasi dan regulasi yang tidak adaptif terhadap pelaku ekonomi kecil.

Temuan ini sejalan dengan studi Wickramasinghe dan Hopper (2023) di Sri Lanka yang menemukan bahwa pelaku ekonomi informal menciptakan sistem pencatatan sendiri untuk menjaga legitimasi sosial di komunitas mereka. Demikian pula, penelitian Gallien (2023) di Afrika menunjukkan bahwa pencatatan internal berfungsi sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap sistem akuntansi negara. Dengan demikian, penelitian ini memperluas teori PEA dengan menunjukkan bahwa praktik akuntansi informal berperan ganda: sebagai instrumen ekonomi dan simbol kekuasaan sosial yang melindungi jaringan perdagangan ilegal dari intervensi eksternal.

Power Relations

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dalam industri rokok ilegal berbentuk hierarkis dan berbasis kekerabatan. Produsen memegang kendali atas strategi produksi dan harga, sedangkan distributor berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan pengecer. Jaringan ini terikat oleh hubungan loyalitas dan rasa saling percaya, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi di antara para pelaku. Beberapa informan menyebut adanya toleransi dari oknum aparat yang memahami "konteks lokal" dari kegiatan ini.

Dalam kerangka PEA, dinamika kekuasaan tersebut memperlihatkan bagaimana legitimasi sosial dapat menyaingi otoritas formal negara. Relasi patronase dan loyalitas komunitas membentuk sistem tata kelola paralel yang tidak membutuhkan regulasi resmi. Menurut Ahsan et al. (2024), kekuasaan ekonomi dalam sistem informal sering kali bersandar pada relasi sosial yang menciptakan stabilitas internal meskipun berada di luar kerangka hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada institusi formal, tetapi juga pada jejaring sosial yang mengatur perilaku ekonomi.

Penemuan ini serupa dengan studi Vincent (2021) di Afrika Selatan dan Wickramasinghe & Hopper (2023) di Asia Selatan yang menyoroti bahwa struktur patronase lokal menjadi fondasi bagi keberlanjutan pasar ilegal. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini memberikan bukti empiris

bahwa kekuasaan berbasis sosial-kultural berperan lebih dominan daripada kekuasaan legal formal dalam mengatur perilaku ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman teori PEA dengan menekankan dimensi budaya dan kekerabatan sebagai elemen utama dalam reproduksi praktik ekonomi ilegal di tingkat komunitas.

Novelty dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan teoretis karena menyoroti bagaimana praktik akuntansi informal berbasis kekerabatan berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial bagi perdagangan ilegal. Tidak seperti penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada kesenjangan perpajakan atau pelanggaran hukum, studi ini menekankan dimensi sosial dan kekuasaan di balik praktik ekonomi informal. *Unlike previous studies focusing on taxation gaps, this study highlights how kinship-based informal accounting legitimizes illicit trade.*

Temuan ini memperluas teori PEA dengan menggabungkan aspek tata kelola sosial dan ekonomi lokal dalam analisis akuntansi politik. Secara kebijakan, hasil penelitian merekomendasikan agar pemerintah memperkuat program edukasi fiskal berbasis komunitas dan memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro agar tidak bergantung pada sistem informal. Selain itu, reformasi pengawasan cukai perlu memperhatikan aspek sosial budaya agar penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kerangka Political Economy of Accounting (PEA) melalui penambahan dimensi budaya lokal yang selama ini kurang diperhatikan dalam studi akuntansi kritis. Temuan menunjukkan bahwa praktik akuntansi informal dalam industri rokok ilegal di Kabupaten GBG-SLM tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh norma sosial, jaringan kekerabatan, dan relasi patronase yang membentuk legitimasi terhadap praktik tersebut. Hal ini memperluas cakupan PEA dengan menegaskan bahwa praktik akuntansi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya, terutama dalam masyarakat dengan struktur ekonomi informal yang kuat.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan Bea Cukai mengembangkan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis pada partisipasi masyarakat lokal. Peningkatan literasi fiskal dan transparansi informasi di tingkat komunitas dapat menjadi langkah awal untuk menekan praktik perdagangan ilegal tanpa menimbulkan resistensi sosial. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena jumlah informan yang terbatas dan lingkup wilayah yang sempit. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed-method atau survei kuantitatif agar mampu menguji secara lebih luas hubungan antara praktik akuntansi informal, struktur sosial, dan penghindaran fiskal di berbagai konteks wilayah lain.

REFERENSI

- Ahsan, T., Rahman, M., & Yousaf, T. (2024). Political economy of accounting and power relations: A critical review. *Critical Perspectives on Accounting*, 93, 102514. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2023.102514>
- Aziz, N., & Cahyani, R. (2023). Social networks and illicit cigarette distribution in Indonesia: An institutional perspective. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(2), 215–233. <https://doi.org/10.1017/S002246342300010X>
- Chalid, P., & Kuswini, H. (2023). Local culture and informal economic legitimacy in rural Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 51(1-2), 89–108. <https://doi.org/10.1163/15685314-bja10123>
- Cooper, D. J., & Sherer, M. J. (1984). The value of corporate accounting reports: Arguments for a political economy of accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 9(3-4), 207–232. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(84\)90008-4](https://doi.org/10.1016/0361-3682(84)90008-4)
- Dahlan, M. (2020). Tax burdens and the growth of Indonesia's shadow economy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(2), 134–148. <https://doi.org/10.22146/jepi.2020.21.2.134>

- Dong, Y., Satyadini, A., & Sinning, M. (2025). Deterrence messages and tax compliance: Evidence from Indonesian MSMEs. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 224, 140–156. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.11.009>
- Ismuhadi, A. (2024). Digital surveillance and fiscal compliance: Implementing tax accounting equation in Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(2), 221–239. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2023-0045>
- Pratiwi, R., Santoso, A., & Lestari, D. (2022). Illegal cigarette trade and fiscal losses: Evidence from Madura. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55–72. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2022>
- Purwanti, L. (2024). Indonesia's shadow economy: Estimates and implications for fiscal policy. *EY Indonesia Report*. Retrieved from <https://www.ey.com>
- Rezky, A. (2020). Taxation, informality, and Indonesia's shadow economy. *Indonesian Journal of Economics and Development*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.15294/ijed.v20i1.2020>
- Saukhan Aulana, M., Hidayat, T., & Fathoni, A. (2025). Double bookkeeping and informal accounting in illicit industries: A critical analysis. *Asian Journal of Accounting Research*, 10(1), 77–95. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2024-0145>
- Slama, A., Haryanto, A., & Widodo, T. (2021). Informality and resilience in Indonesia's shadow economy. *Economic Modelling*, 94, 543–553. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.11.021>
- Solihah, I., & Cahyono, S. (2022). Informal business legitimacy and community trust: Evidence from Indonesia's tobacco sector. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 19(3), 201–219. <https://doi.org/10.19184/jse.v19i3.2022>
- Tanara, A. (2023). Excise taxes and cigarette industry competitiveness in Indonesia. *Journal of Fiscal Policy and Economics*, 15(2), 87–104. <https://doi.org/10.21009/jfpe.152.2023>
- Wahyuni, D., & Asri, R. (2022). Manipulation of financial reporting in the illicit cigarette industry: A case study from Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(1), 33–52. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no1.2>